5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji F-*test*. Hasil uji F pada penelitian ini memiliki nilai koefisien sebesar 3.981 dengan prob (F-statistik) sebesar 0,0000 < 0,05. Hasil ini memiliki arti bahwa variabel bebas (INF, PE, size) secara simultan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap total pembiayaan. Dengan menggunakan uji t-*test* pada model *fixed effect* menunjukkan bahwa hasil dari variabel Log_size secara simultan mempunyai signifkasi dan berpengaruh positif terhadap total pembiayaan BPRS. Namun untuk variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hasil yang tidak signifikan namun berpengaruh positif untuk variabel inflasi, dan berpengaruh negatif untuk variabel pertumbuhan ekonomi terhadap total pembiayaan BPRS di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis uji determinasi diketahui bahwa nilai koefisien determinasi untuk model regresi antara PE, INF dan *size* terhadap total pembiayaan sebesar 0,9754. Nilai ini berarti bahwa sebesar 97% total pembiayaan dipengaruhi oleh PE, INF, Log_Size. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan BPRS di Indonesia. Karena dengan naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi, pembiayaan dari BPRS akan sangat membantu masyarakat yang mengalami defisit dana, sehingga masyarakat mendapatkan tambahan modal untuk meningkatkan unit-unit usaha mereka. Dengan adanya pembiayaan ikut membantu pemerintah untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi karena semakin bertambahnya pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat beserta unit usahanya, maka akan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya.

Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan model *fixed effect*, kepemilikan BPRS yang dipegang oleh swasta lebih mempunyai andil dalam membangun pertumbuhan ekonomi daripada BPRS kepemilikan pemerintah. Karena terbukti dengan pengaruh yang positif dari hasil pengujian pada bagian sebelumnya. Dengan mempunyai 15 kantor dari sekian banyak kantor-kantor yang tersebar di seluruh Indonesia, tetapi BPRS kepemilikan swasta mempunyai andil yang cukup besar terhadap penyaluran pembiayaan guna untuk menopang pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah di Indonesia.

Selain itu BPRS kepemilikan pemerintah harus dapat mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh variabel pertumbuhan ekonomi dengan membuktikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan total pembiayaan milik pemerintah mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan, hal ini makin menguatkan bahwa BPRS milik pemerintah belum mampu mengatasi permasalahan terhadap faktor ekonomi makro yang masih belum dapat teratasi. Namun di sisi lain BPRS kepemilikan swasta lebih menguasai persaingan dikarenakan jumlah kepemilikan BPRS masih banyak dimiliki oleh pihak swasta sebanyak 15 BPRS.

Namun pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap total pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS kepemilikan swasta mempunyai pengaruh positif dan signifikan, hal ini menunjukan bahwa BPRS kepemilikan swasta mempunyai andil lebih dalam

membangun pertumbuhan ekonomi daerah, dikarenakan sudah terbuktinya dari banyaknya kantor yang dimiliki oleh BPRS atas kepemilikan swasta.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan total aset terhadap total pembiayaan BPRS di Indonesia tahun 2013 – 2017 terdapat beberapa rekomendasi. Pertama variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap total pembiayaan BPRS di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada strategi yang dapat dilakukan oleh BPRS di Indonesia baik itu kepemilikan pemerintah maupun swasta, guna untuk meningkatkan pangsa pasar yang relatif masih kecil dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, memperkuat regulasi, serta dengan mengadaptasi perkembangan teknologi yang semakin canggih. Hal ini dikarenakan pola hubungan yang sejalan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan juga total pembiayaan. Sehingga BPRS harus berusaha mengembangkan lagi skema pembiayaan untuk kedepannya.

Kedua, hasil penelitian menunjukan total aset yang dimiliki BPRS milik swasta maupun pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap total pembiayaan BPRS di Indonesia. Hasil menunjukan bahwa BPRS harus meningkatkan dan mempertahankan pengaruh yang positif ini. Hal tersebut akan membantu tren keuangan yang berbasis syariah untuk bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional yang sudah lama berperan aktif di pembiayaan Indonesia. Bukti ini merupakan sinyal kepada pemilik bank syariah, yang dapat berupa bank swasta atau

milik pemerintah, untuk memperbesar aset bank dengan mengundang para investor yang menjanjikan untuk menempatkan uang sebagai modal bagi BPRS. Selain itu, BPRS harus lebih selektif dalam memilih nasabah dalam melakukan kegiatan pembiayaan dan ikut dalam mengawasi usaha pengelolaan dana, oleh sebab itu bank pembiayaan syariah harus mendapat perhatian khusus karena pembiayan merupakan pembiayan bank penuh pada usaha ataupun proyek nasabah

Ketiga, hasil penelitian menunjukan bahwa BPRS milik swasta lebih kontributif daripada BPRS milik pemerintah, karena terbukti dengan pengaruh yang positif dari hasil pengujian yang dilakukan sebelumnya. Maka dari itu pemerintah daerah harus lebih kontributif dalam meningkatkan pembiayaan yang dilaksanakan BPRS, selain itu pemerintah daerah juga memiliki otoritas dalam memberikan peraturan-peraturan yang intensif baik dalam bentuk pajak maupun aturan-aturan lain guna mendorong peningkatan aset. Otoritas seperti bank sentral atau pemerintah dapat mendorong BPRS ukuran menengah dan kecil untuk bergabung dalam mengembangkan proses pembiayaan BPRS. Saran ini dapat memberikan BPRS gabungan untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi yang lebih besar dan manajemen yang lebih baik.